

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memulai pemaparan terkait latar belakang masalah ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga memaparkan beberapa penelitian yang membahas relevansi topik ini, dan juga menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam mendukung penelitian ini serta menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka pemikiran yang digambarkan melalui skema berpikir.

1.1. Latar Belakang

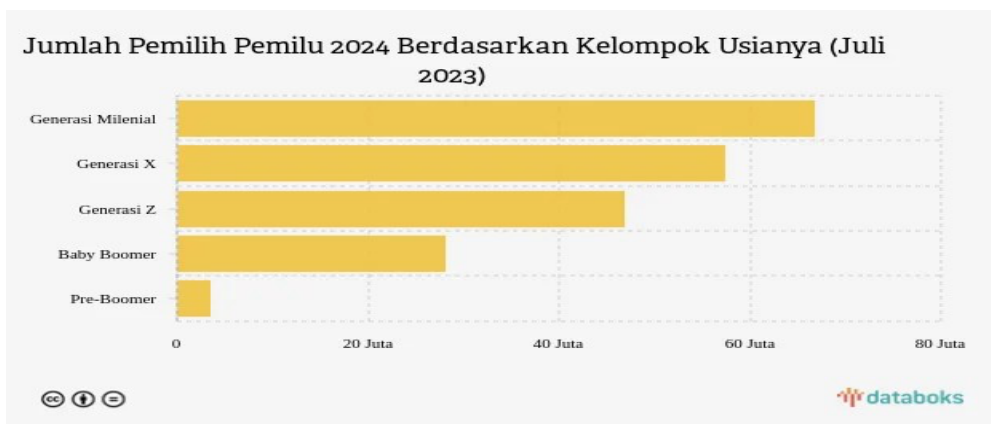
Indonesia merupakan salah satu penganut sistem demokrasi yang sudah berulang kali mengalami perubahan seperti halnya demokrasi parlemen, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi pasca orde baru (Zuhro, 2018). Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yaitu adanya pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPRD, DPD dengan berlandaskan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) yang telah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 2 (Katili & Latuda, 2022; Khodijah & Putra., 2020).

Apabila suatu negara ingin menghadirkan pelaksanaan demokrasi yang lebih baik maka salah satu instrumen pentingnya adalah melalui pelaksanaan Pemilu Legislatif. Dalam banyak literatur ilmu politik, tujuan pelaksanaan pemilu bukan saja semata-mata terkait dengan regenerasi kepemimpinan, memperkuat legitimasi pemerintahan ataupun sarana sosialisasi dan pendidikan politik untuk warga negara, melainkan juga sebagai sarana integrasi bangsa. Pelaksanaan pemilu memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam kepemimpinan politik melalui jalur pemilihan eksekutif ataupun legislatif. Di samping itu, pemilu juga mengedepankan adanya kompetisi yang bebas dan adil untuk menghadirkan legitimasi pemerintahan yang kuat demi terciptanya kepercayaan dari publik. Bila pemerintah memiliki legitimasi yang kuat maka jalannya pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat dapat tercipta dengan baik (Aditya Perdana., 2022).

Dalam Pemilu Legislatif Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting. Salah satu elemen masyarakat yang besar pengaruhnya dalam partisipasi pemilu adalah elemen pemuda. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa idealnya mempunyai peran dalam kemajuan bangsa. Pentingnya peran generasi muda, didasari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan

negara. Pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan dengan keterlibatan atau berpartisipasi pemuda dalam pemilu (Ilham Zitri., 2023). Generasi Muda merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik termasuk di dalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Berdasarkan data statistik KPU, mencatat bahwa partisipasi generasi muda di pemilu legislatif condong mendominasi dibanding generasi sebelumnya. Dan pada akhirnya, Generasi Muda sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan dalam bidang politik (Sutarna et al., 2023).

Gambar 1. Data Jumlah Pemilih 2024 Berdasarkan Kelompok Usia



Menurut data tentang fenomena indeks partisipasi pemilih, terjadi peralihan partisipasi kelompok usia dari generasi tua ke generasi muda. Fenomena yang timbul adalah ketika beberapa tahun kebelakang partisipasi politik didominasi oleh generasi tua atau yang dikenal dengan generasi X. Namun, ketika melihat situasi saat ini maka hal itu berubah, peralihan generasi ke generasi muda (Generasi Millenial) menjadi fenomena yang sudah terjadi saat ini.

Tabel 1. Indeks Partisipasi Pemilu Tahun 2014, 2019, dan 2024

Indeks Partisipasi Pemilu	2014	2019	2024
Presentase	69,6 persen	81,9 Persen	81,7 Persen

Sumber: Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum

Permasalahan yang muncul adalah ketika melihat indeks partisipasi pemilih dari salah satu artikel Kompas yang mewawancarai salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mella, indeks partisipasi pemilu dari tahun 2019 ke tahun 2024 itu terjadi penurunan sebesar 0,12 persen dari tahun 2019. Berbanding terbalik ketika indeks partisipasi pemilih di tahun 2019 mencapai 81,9 persen, naik signifikan dibandingkan Pilpres 2014 yang hanya mencapai 69,6 persen. Hal ini terjadi karena partisipasi generasi muda meningkat di tahun 2019 tapi justru di tahun 2024 terjadi penurunan, padahal menurut angka yang dipaparkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan BAWASLU partisipasi generasi muda mendominasi di pemilu 2024. Tetapi, ketika melihat hasil data setelah pemilu yang terjadi malah penurunan, berbanding terbalik dengan yang terjadi di 2019 (Vitorio Mantalean, Dani Prabowo., 2024).

Kondisi ini tentu saja terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Tolitoli. Hal ini terlihat dari data nasional yang menunjukkan penurunan jumlah pemilih dari tahun 2019 ke tahun 2024. Padahal, pada pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat cukup tinggi, terutama di kalangan anak muda.

Tabel 2. Hasil Data Rekapitulasi Pemilih Di Kabupaten Tolitoli

Generasi	Jumlah Pemilih 2019	Jumlah Pemilih 2024
Gen Z	19520	44819
Milenial	61871	55023
Gen X	43683	46477
Baby Boomer	21039	20634
Pre Boomer	3327	2474
Total Pemilih	149440	169427

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Berdasarkan tabel diatas situasinya semakin menarik. Total jumlah pemilih memang naik dari 149.440 menjadi 169.427, yang didominasi oleh naiknya partisipasi gen z tetapi komposisi partisipasi generasi yang lain mengalami perubahan signifikan. Generasi muda yang saat ini mendominasi di pemilu dalam hal ini generasi Milenial, yang selama ini menjadi tulang punggung partisipasi Politik, justru mengalami penurunan drastis dari 61.871 menjadi 55.023 pemilih. Penurunan partisipasi Politik generasi muda di Kabupaten Tolitoli ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah sinyal penting tentang berkurangnya kepercayaan generasi muda terhadap sistem demokrasi yang ada. Mereka tidak lagi melihat Politik sebagai cara untuk membuat perubahan. Maka dari itu, ketika melihat situasi seperti sekarang ini, dan ketika di masa mendatang agar indeks partisipasi generasi muda semakin meningkat di masa mendatang, maka fenomena ini menjadi suatu isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk civitas akademika.

Civitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan semua badan kepengurusan yang ada di perguruan tinggi memiliki peran yang cukup strategis dalam menggali dan mengembangkan potensi akademik generasi muda untuk menjadi insan yang berkualitas (Karim 2020). Pengetahuan politik yang dimiliki mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pada pemilu, hal ini sejalan dengan yang disampaikan salah satu anggota BAWASLU, Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan arahan dalam Kuliah Umum tentang Peranan Perguruan Tinggi dalam Pilkada yang Berkualitas, menurutnya perguruan tinggi ini salah satu pilar utama atau institusi

utama yang melahirkan generasi-generasi pemilih yang masuk kategori pemilih cerdas. Jadi bukan pemilih yang pragmatis atau pemilih yang konvensional (Christina Kart., 2020)

Sebagai insan akademik, mahasiswa juga dapat memainkan peran dalam proses pendewasaan demokrasi melalui keterlibatan aktif mereka dalam pemilu yang didasari oleh pengetahuan politik yang memadai, hal ini sejalan dengan yang disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU dalam suatu kegiatan sosialisasi BAWASLU di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara. Selain itu, tentu para civitas akademika dapat mendorong kepada peserta pemilu untuk bersiap dalam menawarkan program dan gagasan terbaiknya untuk disampaikan kepada pemilih (Aditya Perdana., 2022).

Melihat kondisi tersebut, pandangan atau persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan politik sangat mempengaruhi bagaimana mereka memandang pentingnya keterlibatan dalam pemilu. Persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan politik memiliki keunikan tersendiri karena terbentuk dalam lingkungan pendidikan yang memberikan akses terhadap berbagai informasi dan diskusi politik. persepsi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana individu menerima informasi politik, tetapi juga bagaimana mereka memproses, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi tersebut berdasarkan pengalaman, nilai, dan konteks sosial yang melingkupinya. Penelitian ini akan berfokus mengkaji tentang persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Tolitoli, yaitu STIE Mujahidin Kabupaten Tolitoli.

Pemilihan STIE Mujahidin Tolitoli sebagai fokus penelitian didasarkan pada jangkauan mahasiswanya yang didominasi oleh generasi muda, yaitu Generasi Z dan generasi milenial. STIE Mujahidin di Tolitoli sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan politik generasi muda, sekaligus berfungsi sebagai wadah strategis bagi pengembangan kesadaran politik mahasiswa dari kedua generasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli terhadap pengetahuan politik yang dimilikinya dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif. Dengan memahami persepsi ini, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan generasi muda dalam pemilu serta bagaimana pengetahuan politik dapat berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul **“Persepsi Politik Mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli Terhadap Pengetahuan Politik Pada Pemilu Legislatif”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi politik mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli dalam pengetahuan politik mengenai pemilu legislatif?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor internal yang mempengaruhi persepsi politik mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli.
2. Mendeskripsikan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi politik mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu politik dan sosiologi politik terkait persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif.
2. Menjadi dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema keterlibatan generasi muda dalam politik dan peran institusi pendidikan dalam pendidikan politik.
3. Memperkaya literatur dan referensi akademik mengenai strategi pemberdayaan politik generasi muda melalui pengetahuan politik di tingkat perguruan tinggi.

Manfaat Praktis

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam memahami pengetahuan politik sebagai partisipasi politik generasi muda
2. Memberikan evaluasi dan masukan Perguruan Tinggi untuk pengembangan program- program yang berkaitan dengan pendidikan politik mahasiswa
3. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi generasi muda untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses politik khususnya pemilu legislatif

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif kurang banyak dilakukan. Tetapi, pembahasan yang berhubungan terkait masalah ini cukup banyak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari, dkk (2023) berfokus pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir di Kabupaten Tolitoli dalam pemilu 2024. Studi ini menyoroti bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pesisir disebabkan oleh minimnya akses informasi dan pendidikan politik. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh civitas akademika Universitas Madako Tolitoli, yang bertujuan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, metode sosialisasi digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka dalam proses demokrasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung civitas akademika mampu membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya menjalin kerjasama yang baik antara civitas akademika, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kerjasama yang sinergis akan memungkinkan penyebaran informasi dan edukasi politik yang lebih luas dan efektif, serta memastikan keberlanjutan program-program peningkatan partisipasi politik. Untuk penelitian tentang persepsi mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Penelitian ini juga memberikan inspirasi untuk merancang program-

program inovatif yang melibatkan dosen STIE dalam memberikan edukasi politik, memfasilitasi dialog, dan mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pemilu legislatif. (Ayu Lestari, dkk 2023)

Selanjutnya, pada penelitian Sri Utaminingsih, dkk (2023) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara, terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Penelitian ini mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi politik sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang politik, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Penelitian ini juga menekankan bahwa tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik tidak hanya terletak pada kurikulum formal di sekolah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk akademisi dan civitas akademika. Hasil penelitian ini relevan dengan konteks penelitian, karena menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi politik kepada generasi muda untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. (Sri Utaminingsih, dkk 2023)

Terakhir, dalam penelitian Yusrin dan Salpina (2023) yang berjudul "Partisipasi Generasi Millenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024" membahas peran generasi milenial dalam pengawasan tahapan pemilu 2024. Studi ini menemukan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menjaga transparansi dan kredibilitas pemilu. Namun, keterlibatan mereka sering kali terhambat oleh kurangnya informasi dan motivasi untuk berpartisipasi aktif. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran generasi milenial sebagai agen perubahan dalam menjaga integritas pemilu. Generasi milenial memiliki akses yang luas terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta memiliki semangat yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan memanfaatkan potensi ini, generasi milenial dapat menjadi pengawas pemilu yang efektif dan independen, serta membantu mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi. Pendekatan berbasis komunitas dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok pengawas pemilu di tingkat desa atau kelurahan, yang melibatkan anggota masyarakat dari berbagai latar belakang. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop bagi mahasiswa dan siswa, serta melibatkan mereka dalam kegiatan pengawasan pemilu. Implikasi dari penelitian ini tentang

penelitian persepsi mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan program-program pengawasan pemilu yang melibatkan mahasiswa STIE. Program-program ini dapat dirancang untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemilu, keterampilan pengawasan, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu di kalangan generasi muda.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan mengangkat persepsi mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli terhadap pengetahuan politik dan pengaruhnya dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif, yang belum banyak dikaji secara spesifik pada konteks lokal dan kelompok mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana pengetahuan politik yang diperoleh di lingkungan kampus dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam pemilu legislatif, sehingga memberikan kontribusi baru dalam literatur atau pembahasan pendidikan politik dan partisipasi politik generasi muda di tingkat lokal.

1.6. Pengetahuan Politik

Pengetahuan politik merupakan salah satu aspek utama dalam studi ilmu politik yang menggambarkan tingkat pemahaman individu terhadap sistem politik, lembaga pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara. Menurut Almond dan Verba (1963) dalam karya klasik *The Civic Culture*, pengetahuan politik menjadi bagian penting dari budaya politik partisipatif karena menentukan sejauh mana warga negara mampu berperan secara aktif dan rasional dalam kehidupan demokratis. Mereka berpendapat bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan politik memadai akan lebih mampu memahami fungsi lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban politik, serta mekanisme partisipasi dalam pemilu dan kebijakan publik. Dengan demikian, pengetahuan politik berfungsi sebagai dasar kesadaran politik yang mengarahkan perilaku individu dalam sistem politik yang demokratis.

Lebih lanjut, Hague dan Harrop (2013) menyatakan bahwa pengetahuan politik tidak hanya bersifat kognitif, yakni pemahaman terhadap struktur dan proses politik, tetapi juga mencakup dimensi afektif, yaitu sejauh mana individu memiliki minat, perhatian, dan kepedulian terhadap isu-isu politik. Dalam konteks mahasiswa, pengetahuan politik mencakup kemampuan memahami bagaimana lembaga legislatif bekerja, bagaimana kebijakan publik dirumuskan, serta bagaimana suara rakyat disalurkan melalui sistem perwakilan. Pengetahuan ini

berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan partisipatif mahasiswa sebagai kelompok sosial yang berpendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor internal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan politik mahasiswa melalui pengajaran formal maupun kegiatan non-akademik seperti diskusi publik, seminar, dan sosialisasi politik.

Menurut Heywood (2013), pengetahuan politik juga dapat dilihat sebagai bentuk *political literacy* atau literasi politik, yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menanggapi isu-isu politik secara rasional dan informatif. Literasi politik inilah yang membedakan warga negara aktif dari warga negara pasif dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks pendidikan tinggi, literasi politik mahasiswa dibentuk melalui interaksi antara pengetahuan akademik dan pengalaman sosial, baik melalui mata kuliah maupun kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh lembaga negara. Interaksi ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami politik secara konseptual sekaligus praktis, sehingga terbentuk kesadaran politik yang lebih utuh.

Sementara itu, Easton dan Dennis (1969) menjelaskan bahwa pengetahuan politik juga diperoleh melalui proses sosialisasi politik, yaitu mekanisme di mana individu belajar mengenal nilai-nilai, norma, dan perilaku politik melalui interaksi dengan lingkungan sosial, pendidikan, dan institusi negara. Dalam konteks mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli, proses ini terjadi melalui kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh institusi pendidikan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung tentang sistem politik Indonesia dan peran lembaga penyelenggara pemilu, yang pada gilirannya memperkuat pengetahuan dan kesadaran politik mereka.

Selanjutnya, Nimmo (1978) menegaskan bahwa pengetahuan politik berkaitan erat dengan persepsi politik, karena cara seseorang memahami dan menilai politik akan menentukan tingkat pengetahuan yang ia miliki. Persepsi politik yang positif terhadap lembaga negara dan sistem politik akan mendorong individu untuk mencari tahu lebih banyak tentang proses politik, sedangkan persepsi negatif dapat menimbulkan sikap apatis. Oleh karena itu, dalam konteks mahasiswa, pengetahuan politik yang kuat cenderung diikuti oleh persepsi politik yang lebih rasional, terbuka, dan partisipatif. Sears dan Valentino (1997) menambahkan bahwa pembentukan pengetahuan dan persepsi politik ini dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan dan interaksi sosial, di mana pembelajaran yang partisipatif

dan kontekstual lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran politik jangka panjang.

Wawasan atau Pengetahuan politik merupakan merupakan konsep sentral dalam studi opini publik dan perilaku politik (Zulkify,.2023). Pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik seseorang, hal ini dapat dijelaskan dalam prespektif behavior dan pendekatan psikologis. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik di antaranya adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang proses politik (Putri Yasmin,.2024)

Pengetahuan politik menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik mereka, khususnya dalam pemilu legislatif. Kesadaran politik mahasiswa tercermin dalam pemahaman mereka akan hak dan kewajiban sebagai pemilih, kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu, kemampuan menganalisis isu- isu politik lokal dan nasional, serta pemahaman dampak kebijakan legislatif terhadap masyarakat. Untuk penelitian di STIE Mujahidin Tolitoli, pengetahuan politik mahasiswa mencakup pemahaman tentang sistem pemilu legislatif, peran dan fungsi lembaga legislatif, pengetahuan tentang partai politik dan kandidat legislatif, serta pemahaman mekanisme pemilihan dan penghitungan suara.

Pengetahuan politik mahasiswa tidak terbentuk secara spontan, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi cara berpikir, sikap, dan pemahaman mereka terhadap sistem politik. Beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat pengetahuan politik mahasiswa antara lain latar belakang pendidikan, akses terhadap informasi, lingkungan sosial, keaktifan dalam kegiatan kampus, serta peran kurikulum dan kerja sama kampus dengan pihak eksternal.

a. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor paling mendasar yang memengaruhi tingkat pengetahuan politik seseorang. Mahasiswa yang berasal dari jurusan atau sekolah dengan muatan pelajaran sosial dan kewarganegaraan yang kuat cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih baik (Almond & Verba, 1963). Pendidikan formal berperan dalam membentuk kesadaran politik melalui pembelajaran tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks mahasiswa, kemampuan berpikir kritis

yang diasah selama pendidikan juga mendorong mereka untuk lebih memahami isu-isu politik dan mengaitkannya dengan realitas sosial (Mutakin, 2020).

b. Akses terhadap Informasi

Kemajuan teknologi informasi dan media digital membuat akses terhadap berita politik menjadi lebih mudah dan cepat. Mahasiswa yang memiliki akses luas terhadap sumber informasi baik melalui media massa, media sosial, maupun literatur akademik cenderung memiliki pengetahuan politik yang lebih tinggi (Strömbäck & Shehata, 2010). Namun, tantangan yang muncul adalah fenomena disinformasi dan bias media, yang dapat membentuk persepsi politik yang keliru jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi media yang baik. Oleh karena itu, kemampuan mahasiswa dalam memilah informasi yang valid menjadi kunci penting dalam meningkatkan pengetahuan politik yang objektif.

c. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, organisasi mahasiswa, dan masyarakat sekitar juga berperan penting dalam membentuk pengetahuan politik mahasiswa. Interaksi sosial memungkinkan terjadinya proses sosialisasi politik, yaitu proses di mana individu memperoleh nilai, sikap, dan orientasi politik dari lingkungannya (Almond & Powell, 1978). Mahasiswa yang berada dalam lingkungan dengan diskursus politik yang aktif cenderung lebih mudah mengembangkan pemahaman dan kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik. Sebaliknya, lingkungan yang apatis terhadap politik dapat menghambat pembentukan kesadaran politik yang kritis.

d. Keaktifan dalam Kegiatan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan diskusi, dan forum kampus menjadi wadah penting bagi pengembangan pengetahuan politik praktis. Melalui pengalaman berorganisasi, mahasiswa belajar tentang dinamika kepemimpinan, pengambilan keputusan kolektif, serta strategi komunikasi politik (Nugroho, 2021). Organisasi intra maupun ekstra kampus juga menjadi sarana sosialisasi nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, semakin aktif mahasiswa dalam kegiatan kampus, semakin tinggi pula peluang mereka untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai politik secara aplikatif.

e. Kurikulum Kampus

Kurikulum pendidikan tinggi berperan strategis dalam membentuk dasar pengetahuan politik mahasiswa, baik secara langsung melalui mata kuliah yang berhubungan dengan politik, maupun secara tidak langsung melalui pendekatan pembelajaran kritis. Kampus yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan, etika publik, atau mata kuliah terkait politik dan pemerintahan mampu menumbuhkan literasi politik yang lebih baik di kalangan mahasiswa (Hidayat, 2022). Kurikulum berbasis critical thinking dan problem-based learning memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menganalisis fenomena politik yang terjadi di sekitar mereka.

f. Kerja Sama Kampus dengan Pihak Eksternal

Kerja sama antara kampus dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penyelenggara pemilu juga berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan politik mahasiswa. Melalui program seperti seminar politik, pelatihan kepemilikan suara, magang di lembaga pemerintahan, maupun kegiatan sosialisasi pemilu, mahasiswa mendapatkan pengalaman empiris yang memperluas wawasan politik mereka (Rizal & Haryanto, 2023). Kolaborasi semacam ini menciptakan jembatan antara dunia akademik dan dunia praktis politik, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengamati dan berpartisipasi langsung dalam proses politik yang sesungguhnya.

1.7. Persepsi Politik

Persepsi politik merupakan proses psikologis dan sosial ketika individu menafsirkan fenomena politik yang ada di sekitarnya berdasarkan pengalaman, nilai, dan lingkungan sosial. Menurut David Easton (1965), politik adalah “the authoritative allocation of values for a society” atau proses distribusi nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, persepsi politik menggambarkan bagaimana individu memahami dan menilai proses distribusi tersebut apakah dianggap adil, korup, atau representatif.

Sementara itu, Nimmo (1978) menjelaskan bahwa persepsi politik merupakan bagian dari komunikasi politik yang berfungsi membentuk political image atau citra politik. Ia menegaskan bahwa persepsi tidak selalu sejalan dengan realitas objektif, karena “perception is a selective process influenced by personal and social factors.” Artinya, apa yang diyakini seseorang tentang dunia politik sering kali merupakan hasil konstruksi subjektif, bukan cerminan fakta yang sebenarnya.

Persepsi politik merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu politik yang menjelaskan bagaimana individu memahami, menilai, dan memberikan makna terhadap fenomena politik di sekitarnya. Rokeach (1968) menjelaskan bahwa persepsi politik terbentuk melalui proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dalam konteks ini, persepsi politik tidak sekadar mencerminkan pandangan spontan terhadap politik, melainkan hasil dari proses pembelajaran dan interpretasi yang kompleks. Persepsi politik menjadi dasar bagi individu dalam menilai legitimasi pemerintah, menafsirkan kebijakan publik, dan menentukan sikap terhadap partisipasi politik.

Menurut Nimmo (1978) dalam *Political Communication and Public Opinion in America*, persepsi politik adalah hasil dari interaksi antara informasi yang diterima individu dan kerangka nilai yang sudah ada dalam dirinya. Artinya, ketika seseorang menerima informasi politik, baik melalui media, pendidikan, maupun pengalaman sosial, informasi tersebut tidak diterima secara netral, melainkan diolah melalui pengalaman pribadi dan latar belakang sosialnya. Oleh karena itu, persepsi politik mahasiswa dapat berbeda-beda meskipun mereka hidup dalam lingkungan politik yang sama, tergantung pada tingkat pengetahuan, minat politik, dan pengalaman belajar yang mereka miliki.

Dalam pandangan Rosenberg dan Hovland (1960), persepsi politik memiliki tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Dimensi kognitif mencakup sejauh mana individu memahami isu atau fenomena politik, dimensi afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi terhadap objek politik (misalnya kepercayaan terhadap lembaga pemilu), sedangkan dimensi konatif menyangkut kecenderungan bertindak, seperti partisipasi dalam pemilihan umum atau kegiatan organisasi politik. Ketiga dimensi ini membentuk kesatuan yang menentukan bagaimana seseorang bersikap terhadap politik. Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki pemahaman politik tinggi (aspek kognitif) dan kepercayaan terhadap sistem politik (aspek afektif) cenderung memiliki dorongan lebih kuat untuk berpartisipasi aktif (aspek konatif).

Selanjutnya, Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1944) dalam penelitian klasik *The People's Choice* menemukan bahwa persepsi politik juga dibentuk oleh influential groups atau kelompok rujukan seperti teman sebaya, keluarga, dan lingkungan kampus. Dalam konteks mahasiswa, interaksi dengan dosen, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan kampus berperan penting dalam membentuk persepsi politik mereka terhadap lembaga negara dan proses demokrasi. Persepsi positif terhadap politik sering kali muncul ketika mahasiswa memiliki pengalaman langsung yang membangun kepercayaan terhadap transparansi dan partisipasi

publik, misalnya melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU atau Bawaslu.

Sementara itu, McLeod dan McDonald (1985) menekankan peran media dan pendidikan dalam memperkuat persepsi politik. Pendidikan berperan sebagai kanal rasionalisasi yang membantu mahasiswa memahami politik secara ilmiah, sedangkan media massa menjadi sumber informasi yang membentuk opini. Namun, persepsi politik yang matang hanya dapat terbentuk jika individu memiliki kemampuan kritis untuk menilai informasi politik yang diterimanya. Oleh karena itu, institusi pendidikan berperan penting dalam mengembangkan critical political thinking agar persepsi politik mahasiswa tidak sekadar reaktif, tetapi berbasis pada pemahaman yang rasional.

Lebih lanjut, Sears dan Valentino (1997) mengaitkan persepsi politik dengan political learning, yakni proses pembelajaran politik yang terjadi sepanjang kehidupan seseorang. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual berada dalam posisi strategis untuk mengembangkan persepsi politik yang lebih terbuka dan analitis, karena mereka memiliki akses terhadap informasi akademik dan pengalaman empiris. Persepsi politik yang terbentuk melalui pengalaman belajar dan keterlibatan sosial ini berfungsi sebagai filter dalam menentukan sikap terhadap isu politik dan lembaga negara.

Persepsi politik mahasiswa dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara pengalaman personal, proses sosialisasi politik, serta paparan terhadap informasi politik yang diperoleh melalui pendidikan formal, media massa, dan media digital. Sebagai kelompok sosial yang relatif terdidik dan berada dalam ruang akademik yang kritis, mahasiswa cenderung membentuk persepsi politik yang lebih reflektif terhadap dinamika kekuasaan, institusi politik, dan proses demokrasi, termasuk dalam Pemilu Legislatif. Persepsi ini tidak hanya berkaitan dengan preferensi terhadap partai atau calon legislatif tertentu, tetapi juga menyangkut penilaian normatif mengenai integritas kandidat, kualitas representasi, transparansi proses pemilu, serta sejauh mana lembaga legislatif mampu memperjuangkan kepentingan publik dan kelompok marginal.

Dalam konteks Pemilu Legislatif, persepsi politik mahasiswa sering kali dipengaruhi oleh evaluasi rasional terhadap kinerja partai politik dan wakil rakyat sebelumnya. Mahasiswa menilai apakah proses "authoritative allocation of values" sebagaimana dikemukakan Easton benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat atau justru dikuasai oleh kepentingan elit. Persepsi negatif terhadap praktik politik uang, patronase, dan korupsi legislatif dapat mendorong sikap apatis,

skeptis, atau bahkan penolakan terhadap partisipasi elektoral. Sebaliknya, persepsi positif terhadap kandidat yang dianggap bersih, kompeten, dan responsif dapat memperkuat kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif sebagai saluran representasi politik yang sah.

Selain itu, persepsi politik mahasiswa dalam Pemilu Legislatif juga dibentuk oleh identitas sosial dan isu-isu substantif yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti pendidikan, lapangan kerja, keadilan sosial, dan kebebasan sipil. Mahasiswa cenderung menilai calon legislatif berdasarkan kemampuan mereka mengartikulasikan isu-isu tersebut dalam program dan platform politik. Dalam kerangka psikologi politik, persepsi ini berfungsi sebagai filter kognitif yang memengaruhi sikap dan perilaku politik, termasuk keputusan untuk memilih, golput, atau terlibat dalam aktivitas politik non-elektoral seperti diskusi publik dan advokasi kebijakan.

Persepsi politik tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Menurut Firmanzah (2008), persepsi politik dipengaruhi oleh “kombinasi antara karakter individu, lingkungan sosial, serta bagaimana pesan politik dikemas dan disampaikan kepada publik.” Faktor internal meliputi nilai-nilai pribadi, ideologi, pengalaman politik, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan politik seseorang. Individu yang memiliki pendidikan politik tinggi cenderung membentuk persepsi yang lebih rasional dan kritis. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh media massa, keluarga, kelompok sosial, dan budaya politik yang berlaku. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga pendukung partai tertentu akan lebih mudah membangun persepsi positif terhadap partai tersebut. Selain itu, faktor situasional seperti kondisi ekonomi, krisis politik, atau momentum pemilu juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam situasi krisis, masyarakat cenderung membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah meskipun kebijakan yang diambil rasional. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi politik bersifat dinamis dan kontekstual.

Proses pembentukan persepsi politik melalui empat tahapan utama, yaitu penerimaan stimulus, penafsiran informasi, pembentukan citra, dan respon politik.

1. Tahap pertama, individu menerima stimulus politik berupa informasi dari media, pidato politik, atau pengalaman langsung.
2. Tahap kedua, individu menafsirkan stimulus tersebut berdasarkan nilai dan kerangka berpikirnya. Misalnya, berita tentang kenaikan harga BBM bisa ditafsirkan sebagai kebijakan ekonomi rasional oleh sebagian orang, tetapi dianggap bentuk ketidakmampuan pemerintah oleh kelompok lain.

3. Tahap ketiga, hasil penafsiran tersebut membentuk citra politik (political image). Citra inilah yang menjadi dasar penilaian terhadap aktor atau lembaga politik. Menurut Nimmo (1978), citra politik berfungsi sebagai simbol yang menyederhanakan kompleksitas dunia politik agar dapat dipahami publik.
4. Tahap keempat, persepsi itu menghasilkan respon politik, seperti kepercayaan, dukungan, atau bahkan sikap apatis terhadap politik.

Dalam konteks penelitian terhadap mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli, persepsi politik terlihat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal berupa latar belakang pendidikan yang membentuk cara berpikir kritis terhadap isu-isu politik. Mahasiswa yang memperoleh pendidikan politik melalui kegiatan sosialisasi atau pembelajaran non-akademik cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap proses demokrasi. Kedua, faktor eksternal berupa kerja sama antara kampus dan lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu yang menciptakan ruang interaksi langsung antara mahasiswa dengan penyelenggara pemilu. Proses ini memperkuat kepercayaan mahasiswa terhadap sistem politik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu.

1.8. Pemilu Legislatif

Pemilu Legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan karena menjadi mekanisme konstitusional bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Melalui Pemilu Legislatif, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses seleksi politik yang menentukan siapa yang akan menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, serta penyaluran aspirasi masyarakat dalam struktur negara. Dalam konteks negara demokratis, pemilu legislatif tidak hanya berfungsi sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan politik dan sarana akuntabilitas publik.

Secara normatif, Pemilu Legislatif diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip langsung dan umum menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih tanpa diskriminasi, sementara prinsip bebas dan rahasia melindungi kebebasan individu dalam menentukan pilihan politik tanpa tekanan. Prinsip jujur dan adil menuntut penyelenggaraan pemilu yang transparan, setara, dan bebas dari manipulasi, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi normatif bagi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang terpilih.

Dalam praktiknya, Pemilu Legislatif melibatkan kontestasi antara partai politik dan calon legislatif untuk memperebutkan kursi di lembaga perwakilan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai politik berperan sebagai instrumen utama rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi aspirasi masyarakat. Melalui pemilu, partai politik menawarkan visi, ideologi, serta program kebijakan kepada pemilih, sementara pemilih menilai dan menentukan pilihan berdasarkan preferensi politik, identitas sosial, serta evaluasi terhadap kinerja politik sebelumnya.

Pemilu Legislatif juga memiliki dimensi kompetitif yang kuat, di mana proses elektoral menjadi arena pertarungan ide, kepentingan, dan kekuasaan. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi elit politik secara damai dan konstitusional. Pergantian wakil rakyat melalui pemilu memungkinkan pembaruan kepemimpinan legislatif tanpa kekerasan, sekaligus mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Namun demikian, kompetisi elektoral juga rentan terhadap distorsi, seperti politik uang, klientelisme, dan manipulasi identitas, yang dapat mereduksi kualitas demokrasi substantif.

Dari perspektif representasi politik, Pemilu Legislatif bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga perwakilan mencerminkan keragaman kepentingan, identitas, dan aspirasi masyarakat. Representasi tidak hanya dimaknai secara numerik, tetapi juga substantif, yakni sejauh mana wakil terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituennya. Oleh karena itu, kualitas Pemilu Legislatif tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dari kemampuan sistem elektoral menghasilkan wakil rakyat yang responsif, akuntabel, dan berintegritas.

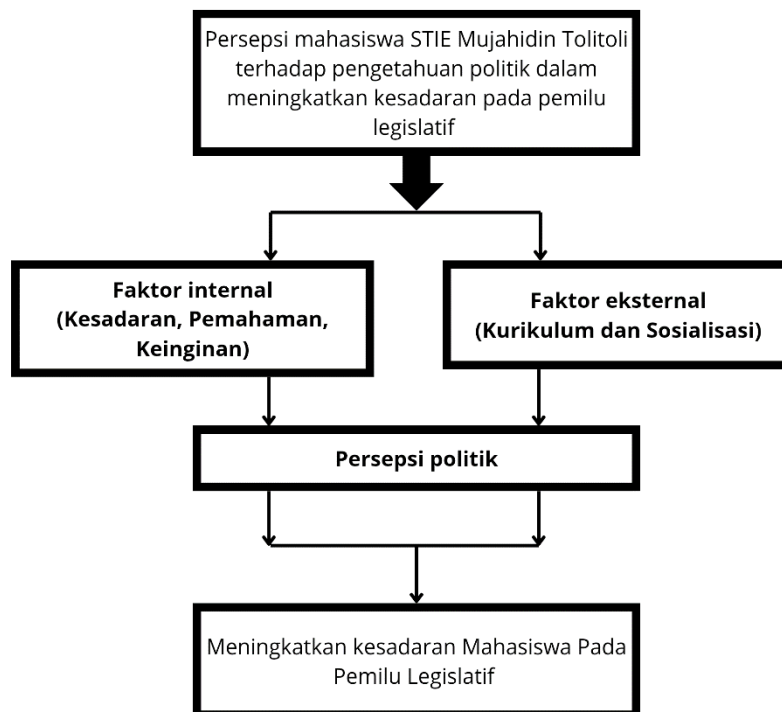
Selain fungsi representasi, Pemilu Legislatif memiliki peran penting dalam pendidikan politik masyarakat. Proses pemilu membuka ruang bagi warga negara untuk belajar tentang hak dan kewajiban politik, memahami isu-isu publik, serta menilai kinerja aktor dan institusi politik. Dalam jangka panjang, pemilu berkontribusi pada pembentukan budaya politik demokratis, di mana partisipasi, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi nilai yang diinternalisasi dalam kehidupan politik sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, Pemilu Legislatif memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh sistem multipartai, sistem pemilihan proporsional, serta keragaman sosial dan budaya masyarakat. Sistem proporsional membuka peluang bagi representasi politik yang lebih luas, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan

berupa fragmentasi politik dan lemahnya kohesi kelembagaan di parlemen. Oleh karena itu, Pemilu Legislatif di Indonesia tidak hanya menjadi ajang memilih wakil rakyat, tetapi juga cerminan dinamika hubungan antara negara, partai politik, dan masyarakat dalam proses demokratisasi yang terus berkembang.

1.9. Kerangka Berpikir

Persepsi politik mahasiswa merupakan hasil dari proses kognitif dalam memahami, menilai, dan menafsirkan fenomena politik yang mereka alami, khususnya terkait pemilu legislatif. Persepsi politik mahasiswa dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman belajar, dan motivasi pribadi mahasiswa untuk memahami sistem pemerintahan serta peran lembaga legislatif. Sementara faktor eksternal mencakup peran institusi pendidikan melalui kurikulum politik dan kerja sama kampus dengan lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu yang menyelenggarakan sosialisasi politik di lingkungan kampus. Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut berimplikasi pada peningkatan kesadaran politik mahasiswa, terutama dalam konteks pemilu legislatif.



BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan teknis analisis data.

2.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Agus Rustamana, Rohmah, Natasya, & Raihan, 2024). Pendekatan ini untuk menggambarkan secara mendalam persepsi mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan individu atau kelompok pada suatu masalah sosial dan kemanusiaan. Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian secara tepat dan akurat mengenai berbagai aspek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji mendalam bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif dengan memperhatikan konteks institusional, budaya, dan sosial di lingkungan STIE Mujahidin Tolitoli.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mujahidin Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. STIE Mujahidin merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki peran signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tolitoli, populasi mahasiswa yang termasuk generasi muda pemilih, dan fenomena penurunan partisipasi politik generasi milenial di daerah Tolitoli.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. (Abror K:2013). Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung bersama informan.

2. Data sekunder

Menurut W. Creswell (2014) dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain untuk tujuan yang berbeda. Data ini berupa laporan penelitian, statistik pemerintah dan dokumen lainnya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi-studi sebelumnya terkait peranan civitas akademika stie kabupaten Tolitoli terhadap keterlibatan generasi muda pada pemilu legislatif. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan literatur terkait dan relevan dengan penelitian. Literatur berupa jurnal dan juga penelitian terdahulu peneliti gunakan pada sebagai landasan pada penelitian ini.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari seseorang atau sekelompok orang secara lisan. Dalam hal ini, wawancara dengan insan akademik STIE Mujahidin Tolitoli, yang terdiri dari Mahasiswa, dosen, dan jajaran staf kampus.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut Creswell (2014) adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa laporan, berita, ataupun penelitian terdahulu terkait persepsi mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada pemilu legislatif.

2.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang dianggap memiliki informasi, pengalaman, dan pandangan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan politik dalam meningkatkan kesadaran pada Pemilu Legislatif di lingkungan STIE Mujahidin Tolitoli. Informan dipilih karena mereka memiliki keterlibatan langsung dalam dinamika kehidupan kampus, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pihak pengelola lembaga pendidikan tinggi.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Melalui teknik ini, peneliti dapat menentukan subjek yang paling memahami situasi sosial yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual.

Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini meliputi dua kelompok besar, yaitu:

1. Mahasiswa STIE Mujahidin Tolitoli, baik yang aktif maupun kurang aktif dalam kegiatan organisasi kampus, untuk menggambarkan variasi tingkat pengetahuan dan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang dipilih berasal dari angkatan 2021 dengan pertimbangan bahwa mereka telah cukup lama menjadi mahasiswa dan sedang menempuh pendidikan di semester 6 sehingga telah memiliki banyak pengalaman sebagai mahasiswa di STIE Mujahidin Tolitoli.
2. Petinggi atau pimpinan kampus, yang terdiri atas Ketua Yayasan dan para Wakil Ketua STIE Mujahidin Tolitoli, untuk memperoleh perspektif kelembagaan mengenai peran kampus dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa melalui kebijakan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan.

Pemilihan informan mahasiswa didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan kelompok intelektual muda yang menjadi sasaran utama penelitian, dengan dinamika pengetahuan dan partisipasi politik yang beragam. Sementara itu, pemilihan informan dari unsur pimpinan kampus dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan dan lingkungan akademik berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan politik mahasiswa. Pada penelitian ini, informan penelitian yang telah terlibat sebagai berikut:

1. M. Maaruf Laedi, mahasiswa yang aktif berorganisasi angkatan 2021
2. Agustina, mahasiswa yang aktif berorganisasi angkatan 2021
3. Elfa Novitasari, mahasiswa yang aktif berorganisasi angkatan 2021
4. Rizki Mahmud, mahasiswa yang kurang aktif berorganisasi angkatan 2021
5. Fitri, mahasiswa yang kurang aktif berorganisasi angkatan 2021
6. Fitri Arham, mahasiswa yang kurang aktif berorganisasi angkatan 2021
7. Agosto Yosua Sulle, mahasiswa yang aktif berorganisasi angkatan 2021
8. Rifka Akbar, mahasiswa yang kurang aktif berorganisasi angkatan 2021
9. Mochsen M. Ahmad, Ketua Yayasan STIE Mujahidin Tolitoli
10. Moh. Sujai, Wakil Ketua 1 STIE Mujahidin Tolitoli
11. Ilham, Wakil Ketua 2 STIE Mujahidin Tolitoli

12. Muh. Irvan, Wakil Ketua 3 STIE Mujahidin Tolitoli

Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan dua belas informan, yang terdiri dari delapan mahasiswa dan empat pimpinan kampus. Jumlah tersebut dianggap memadai secara metodologis, karena telah mencakup variasi yang diperlukan antara kelompok mahasiswa (berdasarkan tingkat keaktifan organisasi) dan kelompok struktural kampus (berdasarkan jabatan dan tanggung jawab kelembagaan). Dalam pendekatan kualitatif, ukuran sampel tidak ditentukan secara statistik, melainkan berdasarkan prinsip kecukupan informasi (information power) dan kejenuhan data (data saturation) di mana jumlah informan dianggap cukup ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru (Morse, 2015; Guest, Namey, & Chen, 2020).

2.6. Teknik Analisis Data

Riset ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data secara deskriptif untuk memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini akan mencakup penjelasan baik secara lisan maupun tulisan dari para informan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang ada dan mempertimbangkan konteks serta tujuan penelitian.